



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI  
**SUB UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TEGOEH WYNARNO HAROENO**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **112772**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.547.734.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/250 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 399.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2310 m2/300 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 308.520.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/250 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 444.156.000		
4. Tanah Seluas 314 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 4.396.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 43.200.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 591 m2/240 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 348.462.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>180.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>123.808.311</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>750.000.000</b>



Sub Total	Rp.	2.601.542.311
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.601.542.311

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.